

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai konflik di Papua, tak lepas dengan isu gerakan Organisasi Papua Merdeka. Perjalanan sejarah masyarakat Papua pada kurun waktu 1962-1969 atau yang dikenal dengan istilah masa integrasi Papua, merupakan masa yang sangat buruk. Seperti yang dikemukakan oleh Pekey dalam bukunya,

“Dalam benak rakyat Papua masa integrasi merupakan pengalaman mimpi buruk mencekam yang harus dirasakan selama delapan tahun di bawah “lars” dan “laras” kezaliman, karena selama itu realitas politik, hukum, dan kemanusiaan di tanah Papua sarat dengan berbagai pelanggaran hak asasi manusia, peniadaan hak sejarah, hak politik, hak atas keadilan, hak budaya, serta hak rakyat di bidang sosial ekonomi” (Pekey, 2018, hal. 44).

Konflik yang terjadi di Papua menunjukkan munculnya rasa nasionalisme sebagai pribumi Papua terhadap bangsa luar yang merupakan suatu bentuk kesadaran politik dari bangsa Papua. Menurut Natalius Pigay (2001) konflik nasionalisme tersebut terjadi diantara tiga kelompok yang berbeda. Pertama, konflik antara warga Papua sebagai etnik pribumi dan Belanda yang dimulai tahun 1828-1962; kedua, konflik antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi tahun 1946-1962; dan ketiga, konflik antara orang Papua dan Indonesia yang terjadi pada tahun 1962 sampai sekarang (Pekey, 2018, hal. 21).

Pigay (2001) menyatakan konflik antara orang Papua dan Indonesia semakin terasa secara fisik ketika penangkapan Terianus Aronggear yang memproklamasikan Papua di Ayamaru, Sorong, dan dilanjutkan dengan pemberontakan besar-besaran oleh Permenas Ferry Awom di Asrama Militer Arfai, Manokwari, pada 28 Juli 1965 (Pekey, 2018, hal. 46-47). Gerakan perlawanan inilah yang oleh pemerintah Indonesia dinamakan sebagai gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kemudian akhirnya nama tersebut pada tahun 1965 dipakai oleh pemerintah untuk menamai gerakan anti pemerintah kepada setiap orang Papua yang bertentangan sikap dan pandangannya terhadap kebijakan Pemerintah Republik Indonesia.

Kondisi dan keadaan Papua yang terus saja seperti ini seringkali menimbulkan ketidakpercayaan orang Papua terhadap pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akibat dari rasa ketidakpercayaan tersebut mereka seringkali melakukan pertentangan dan perlawanan sampai dengan sekarang ini. Lebih lanjut lagi kini semakin banyak dari masyarakat Papua yang terus menyuarakan referendum dan ancaman disintegrasi bangsa di beberapa daerah Papua, sehingga negara melakukan pendekatan keamanan untuk menangani berbagai konflik di Papua. Fenomena gerakan OPM dalam konflik yang terjadi di Papua, menjadikan OPM sebagai sumber berita yang menarik bagi media massa untuk diekspos ke masyarakat. Dalam lima tahun terakhir, setidaknya ada enam kejadian konflik yang melibatkan OPM dan aparat pemerintahan TNI-Polri. Termasuk kasus

penembakan terhadap 31 pekerja pembangunan jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak Kabupaten Nduga, Papua, pada 4 Desember 2018 lalu.

Pola pemberitaan tentang konflik TNI-Polri dengan kelompok OPM yang belakangan ramai diberitakan dapat digambarkan seperti TNI-Polri membuat pernyataan tentang konflik yang terjadi, kemudian anggota dari OPM menyampaikan klaim atau bantahan. Begitu terus berputar-putar dari satu kejadian ke kejadian lainnya. Begitu pula format cerita bila ada konflik antara aparat dengan Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM). Kondisi Papua muncul di media massa nasional hanya ketika terjadi konflik. Sehingga dalam gambaran masyarakat, Bumi Cendrawasih terkesan sebagai daerah yang selalu berbahaya bagi orang luar.

Ketika kembali pada pengertiannya, media massa dapat diartikan sebagai alat-alat dalam komunikasi yang bisa menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada audience yang luas dan heterogen, mengatasi hambatan ruang dan waktu, dan juga media massa mampu menyebarkan pesan hampir seketika pada waktu yang tak terbatas (Nurudin, 2007, hal. 9). Kemudian apabila melihat isi sebuah media massa tentang bagaimana pembentukan wacana sosial di dalamnya, maka sama saja dengan melihat bagaimana media merepresentasikan dunia ini, melalui simbol-simbol apa media menyebarluaskan sebuah wacana kepada masyarakat, serta hubungan-hubungan apa yang terbentuk. Semua itu, direfleksikan dalam berita yang dihasilkan oleh media tersebut. Proses pembentukan wacana oleh

media, ternyata juga dipengaruhi oleh pihak-pihak yang “memegang” media itu sendiri. Pemahaman ini berlandaskan pada pandangan paradigma kritis.

Everett M. Rogers menyebutkan bahwa dalam paradigma ini media dipandang sebagai entitas yang tidak netral atau bebas nilai, tetapi sangat rentan akan penguasaan oleh pihak ataupun kelompok dominan, yang dipenuhi oleh prasangka, retorika, dan propaganda (Eriyanto, 2001, hal. 23). Seperti dalam artikel pada halaman *vice.com* menceritakan bagaimana kebanyakan dari media menggambarkan Papua sebagai sebuah zona yang sangat berbahaya bagi orang luar (Badudu, 2017, hal. 1). Dalam artikel itu dikatakan apabila sebuah konflik yang terjadi di tanah Papua, orang-orang sejauh ini hanya bisa mendapat gambaran dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh mereka yang bertikai. Sayangnya, pernyataan-pernyataan itu sulit diuji validitasnya kecuali jika ada satu atau dua media yang memutuskan untuk meliput langsung dan memantau situasi kondisi dengan mata kepala sendiri.

Dalam kasus penyanderaan 1.300 warga di kampung Banti dan Kimbel yang terjadi pada November 2017, dua desa yang letaknya tak seberapa jauh dari Tembagapura, dan juga dari Tambang Grasberg milik Freeport McMoran, wartawan Seputar Papua, Irsul Panca Aditra, yang bertugas di Timika, dalam artikel *vice.com* mengatakan, upaya melaporkan yang sebenarnya terjadi di lokasi tertentu bukan perkara gampang bagi wartawan setempat. Wartawan setempat bukannya tak mau memverifikasi klaim polisi soal penyanderaan 1.300 warga di

Banti dan Kimbely, akan tetapi memang sangat sulit untuk mendapatkan akses ke sana (Badudu, 2017, hal. 1).

Setiap media memang mempunyai gaya tersendiri dalam mengemas suatu berita ataupun informasi. Model-model pengemasan berita yang dilakukan oleh media ini tergantung bagaimana pandangan, sikap atau kepentingan dari redaksi atau bahkan sang pemilik media tersebut. Menurut Eko Harry Susanto dalam Jurnal Komunikasi, Volume 1, Nomor 6, Januari 2013 berjudul Media Massa, Pemerintah dan Pemilik Modal, mengatakan:

“Tanpa menafikan upaya dari penguasa untuk mengendalikan media massa, tetapi yang juga mengkhawatirkan adalah intervensi terselubung terhadap pemberitaan dan penyiaran media massa yang dilakukan oleh pemilik modal. Gejala umum tindakan menguasai pemberitaan dengan memanfaatkan kelemahan kepemilikan media dan praktisi media dalam hal finansial, sehingga pemilik modal dapat menitipkan berbagai berita yang dikehendaki oleh para pengusaha” (Susanto, 2013, hal. 482).

Pada tanggal 5 Desember 2018 lalu, berbagai media baik cetak, elektronik, maupun daring ramai memberitakan sebuah kasus penembakan terhadap 31 pekerja pembangunan jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak Kabupaten Nduga, Papua, oleh Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sejumlah media di Indonesia turut memberitakan, termasuk surat kabar harian Kompas, dan Republika. Kedua media tersebut dapat dikatakan juga merupakan harian umum yang paling laris dikonsumsi oleh masyarakat. Hal tersebut membuat seluruh wacana yang ditampilkan oleh kedua media tersebut

cukup berpengaruh pada masyarakat secara khusus, dan masyarakat Indonesia secara umumnya.



Foto 1. Headline Surat Kabar Harian Republika terbitan 5 Desember 2018 dengan Judul “Teror di Nduga”
Sumber: Foto Pribadi



Foto 1. Headline Surat Kabar Harian Kompas terbitan 5 Desember 2018 dengan Judul “Pembangunan Berlanjut”
Sumber: Foto Pribadi

Pemberitaan pada dua surat kabar harian Kompas dan Republika yang terbit pada tanggal 5-12 Desember 2018, mengenai insiden penembakan di kabupaten Nduga menjadi headline utama di keduanya, namun wacana yang ditampilkan sangat berbeda. Seperti pada surat kabar harian Kompas, berita yang ditampilkan mengenai pernyataan presiden Joko Widodo yang mengatakan bila terror tersebut tidak akan membuat negara takut, sehingga pembangunan di Papua akan terus berlanjut. Judul yang dipilih pada headline tersebut juga terlihat bagaimana surat kabar harian Kompas ingin menampilkan tentang sikap negara yang optimis dalam menghadapi dan menangani suatu insiden yang mengganggu program pembangunan daerah. Sehingga terlihat seperti Kompas sedang ingin membangun wacana yang mencitrakan sisi positif dari pemerintah.

Kemudian pada surat kabar harian Republika, berita yang ditampilkan mengenai kronologi, kondisi pasca terjadinya insiden penembakan dan tindakan penanganan aparat dalam merespon insiden tersebut. Dalam pemilihan judul berita, Republika seperti ingin menampilkan wacana adanya sebuah kekacauan di Kabupaten Nduga yang dipicu penyerangan oleh Tentara Pembebasan Nasional/ OPM.

No	Tanggal Terbit	Judul Berita	
		Kompas	Republika
1	5/12/2018	Pembangunan Berlanjut	Teror di Nduga
2	6/12/2018	Penembakan di Nduga: Jenazah 15 Pekerja Telah	Evakuasi Diwarnai Baku Tembak

		Ditemukan	
3	7/12/2018	Proyek Dilanjutkan Pekan Depan Penembakan Papua: 16 Jam yang Tak Terlupakan	JK: TNI-Polri Operasi Besar-Besaran
4	8/12/2018	Pencarian Diteruskan Rebut Hati Masyarakat Papua	Separatis Terus Ditekan
5	9/12/2018	Tim Menyusuri Tiga Distrik di Nduga	Jenazah Pekerja PT Istaka Karya Diterima Keluarga
6	10/12/2018	Upaya Hukum Dilakukan Profesional	TNI-Polri Kuasai Yigi
7	11/12/2018	-	Polisi: Warga Tewas di Nduga Mungkin Anggota KKB
8	12/12/2018	-	Ratusan Warga Nduga Mengungsi ke Hutan

Isu tentang OPM dalam media massa ini dirasa menjadi cukup penting, hal tersebut dibuktikan pada penelusuran terkait penelitian tentang Operasi Papua Merdeka (OPM) yang telah dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan dari penelusuran peneliti terdapat beberapa jurnal yang memiliki bahasan terkait OPM. Penelitian pertama merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Iqbal berjudul, Kedudukan

Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional, yang dimuat dalam Jurnal Universitas Lampung seri Monograf volume 2: “Dimensi Hukum Internasional”, tahun 2014 halaman 201-210. Penelitian ini fokus pada pembahasan bagaimana hukum humaniter internasional memandang OPM dan apakah dapat diterapkan pada kasus konflik di Papua atau tidak. Penelitian ini melihat dari kacamata hukum dengan penyajian data secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif.

Penelitian kedua merujuk pada penelitian Poltak Partogi Nainggolan yang berjudul, Aktivitas Internasional Gerakan Separatisme Papua yang dimuat juga dalam Jurnal Kajian DPR RI volume 19, nomor 3, September 2014 halaman 181-199. Penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara melalui Focus Group Discussion (FGD) ini fokus pada pembahasan bagaimana kampanye dan diplomasi yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Penelitian ketiga merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Enggar Dwi Ammy yang berjudul Strategi Media Relations Divisi Penerangan Sosial Budaya (Pansosbud) KBRI Australia Terkait Pemberitaan Kasus Organisasi Papua Merdeka (OPM). Penelitian ini dimuat dalam Jurnal Universitas Airlangga, Commonline volume 3 nomor 1/ 2014-06. Fokus pada penelitian ini adalah tentang bagaimana strategi media relations yang dilakukan oleh Divisi

Penerangan Sosial Budaya KBRI Australia dalam menanggapi pemberitaan terkait kasus Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, belum ada penelitian yang fokus mengkaji tentang wacana pemberitaan OPM dalam berita media massa. Penelitian ini layak untuk dilakukan, sehingga bermanfaat untuk mengetahui kepentingan-kepentingan apa yang ada dalam suatu media ketika memberitakan isu terkait Organisasi Papua Merdeka (OPM). Berangkat dari contoh tersebut, peneliti sangat tertarik untuk meneliti bagaimana media mewacanakan suatu isu yang sedang berkembang di masyarakat, dalam hal ini peneliti memilih isu mengenai kasus penembakan terhadap 31 pekerja pembangunan jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak Kabupaten Nduga, Papua, oleh Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM).

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latarbelakang masalah di atas, dapat ditarik rumusan masalah untuk penelitian ini adalah bagaimana wacana pemberitaan yang dibentuk oleh harian Kompas dan Republika dalam kasus penembakan terhadap 31 pekerja pembangunan jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak Kabupaten Nduga, Papua, oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan teks pemberitaan Kompas dan Republika yang memunculkan wacana pada insiden penembakan terhadap 31 pekerja pembangunan jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak Kabupaten Nduga, Papua, oleh Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM)
2. Mengetahui teks wacana pemberitaan yang membentuk konteks sosial pada surat kabar harian Kompas dan Republika terkait pemberitaan insiden penembakan terhadap 31 pekerja pembangunan jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak Kabupaten Nduga, Papua, oleh Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat memberi gambaran terkait wacana yang dibangun oleh media massa Indonesia (Kompas dan Republika) dalam berita tentang tragedi penembakan pekerja pembangunan jembatan di Kabupaten Nduga.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat memberi gambaran kepada khalayak mengenai bagaimana wacana yang dibentuk dalam pemberitaan sebuah surat kabar dan media massa lain. Diharapkan juga dapat

bermanfaat bagi pengambil kebijakan, dan juga wartawan serta dapat menjadi penyadaran bagi masyarakat tentang bagaimana pembenaran terkonstruksi dan dipengaruhi oleh wacana pada pemberitaan sebuah media.

E. Kerangka Teori

1. Teori Wacana

Teori wacana digunakan untuk memahami berbagai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Wacana disini tidaklah dipahami sebagai serangkaian kata atau proposisi dalam teks saja. Menurut Foucault, wacana adalah sesuatu yang memproduksi sesuatu yang lain (sebuah gagasan, konsep, atau efek). Wacana dapat dideteksi karena secara sistematis suatu ide, opini, konsep dan pandangan hidup dibentuk dalam suatu konteks tertentu sehingga mempengaruhi cara berpikir dan bertindak tertentu (Eriyanto, 2001, hal. 65). Wacana membentuk dan mengkonstruksi suatu peristiwa tertentu dan gabungan dari peristiwa-peristiwa tersebut ke dalam narasi yang dapat dikenali oleh suatu kebudayaan tertentu. Kemudian wacana dapat membatasi cara pandang seseorang terhadap suatu obyek. Dengan kata lain, wacana merupakan cara untuk mengetahui, menilai, dan mengalami dunia. Oleh karena itu, wacana dapat digunakan untuk penegasan suatu kekuasaan dan pengetahuan, serta dapat digunakan untuk memertahankan diri dan melakukan kritik.

Dalam suatu masyarakat biasanya terdapat berbagai macam wacana yang berbeda satu sama lain, namun kekuasaan memilih dan mendukung wacana tertentu sehingga wacana tersebut menjadi dominan, sedangkan wacana-wacana lainnya “terpinggirkan” (*marginalized*) atau “terpendam” (*submerged*) (Eriyanto, 2001, hal. 77). Artinya, wacana yang digunakan dalam konteks sehari-hari berperan dalam membangun kekuasaan dan pengetahuan dengan tujuan untuk menyusun regulasi dan normalisasi, untuk pengembangan hubungan pengetahuan dan kekuasaan baru, dan hegemoni.

Dalam masyarakat wacana juga dilihat sebagai bahasa dalam praksis sosial, atau bahasa yang menjadi peristiwa sosial. Wacana menyediakan bahasa untuk membuat pernyataan tentang topik khusus pada periode sejarah tertentu. Dari sini Foucault tertarik pada wacana lebih sebagai aturan-aturan dan praktik-praktik wacana yang menghasilkan masalah-masalah yang bermakna dan diatur sesuai dengan periode sejarah, artinya ada pemaknaan yang menentukan pada suatu periode sejarah tertentu (Haryatmoko, 2017, hal. 3). Lanjutnya N. Fairclough (2010) juga mengatakan, bahwa wacana adalah praksis sosial dalam bentuk interaksi simbolis yang bisa terungkap dalam pembicaraan, tulisan, kial, gambar, diagram, film, atau musik. Sehingga banyak yang menggunakan wacana untuk mencapai tujuan-tujuan sosial, termasuk untuk membangun kohesi sosial atau perubahan-perubahan sosial (Haryatmoko, 2017, hal. 4). Dari definisi tersebut dapat ditarik sebuah pengertian sederhana bila wacana selalu melibatkan kekuasaan dan ideologi,

terhubung ke masa lalu dan konteks saat ini (sejarah), dan dapat ditafsirkan secara berbeda oleh tiap orang karena mereka memiliki latarbelakang pengalaman, pengetahuan, dan posisi yang berbeda-beda.

Peran wacana ini bisa dipahami karena bahasa mampu mendefinisikan dan menghasilkan objek pengetahuan. Contohnya, definisi psikologi tentang “kedewasaan”: sifat orang yang terbuka, bisa kerja sama, mampu mendengarkan, mampu bertanggung jawab. Pengetahuan ini akan mempengaruhi bagaimana gagasan itu dipraktikan dan digunakan untuk mengatur perilaku. Misal penerimaan karyawan, seleksi pimpinan, syarat masuk perguruan tinggi, akan bertumpu pada kriteria yang sudah ditetapkan oleh psikologi itu. Wacana ini akan mengatur cara membahas sesuatu, mendefinisikan, bicara, menulis, dan bertindak. Itulah mengapa wacana disebut sebagai praktik sosial.

Dalam definisi Ricoeur (1986), wacana memiliki empat unsur, yaitu pertama, ada subjek yang menyatakan; kedua, kepada siapa disampaikan; ketiga, dunia atau wahana yang mau direpresentasikan; dan keempat, temporalitas atau konteks waktu (Haryatmoko, 2017, hal. 5). Pemahaman unsur-unsur wacana Ricoeur ini bisa membantu menjelaskan mengapa oleh Foucault dan Wetherell, wacana dilihat sebagai praksis sosial karena wacana sudah merupakan tindakan. Wacana bisa dianalisis dalam kerangka aktivitas, relasi sosial dan teknologi komunikasi. Maka ada aktivitas yang bentuk utamanya adalah wacana (kuliah, rapat, ibadat, wawancara), dan ada wacana

hanya sebagai aktivitas penunjang (sepakbola, kerja bakti, membangun rumah).

2. Hegemoni Media

Hadirnya media massa memberikan dampak yang signifikan dalam mempengaruhi kehidupan di masyarakat. Namun dalam praktiknya media tetap mengikutsertakan perspektif dan cara pandang mereka dalam menafsirkan realitas sosial. Media akan memilih, untuk kemudian menentukan aspek-aspek yang ditonjolkan maupun dihilangkan, menentukan struktur berita yang sesuai dengan kehendak mereka, dari sisi mana peristiwa yang ada disoroti, bagian mana dari peristiwa yang didahulukan atau dilupakan, serta bagian mana dari peristiwa yang ditonjolkan atau dihilangkan, lalu siapa yang sekiranya pantas diwawancarai untuk menjadi sumber berita, dan lain-lain.

Teori ilmu pengetahuan sosial yang menyangkut media telah banyak dikembangkan sejak lama untuk merumuskan dan memberikan jawaban terhadap sejumlah masalah utama mengenai bagaimana media membentuk realitas publik dalam masyarakat. Beberapa teori yang masih relevan dengan pandangan kritis dan hingga kini masih dipakai untuk mengetahui bagaimana media membentuk realitas dalam masyarakat adalah hegemoni media.

Jika menganalisis media modern berdasarkan pemikiran Karl Marx, maka media dapat dimasukkan sebagai alat produksi industri yang

cenderung dimonopoli oleh kelas penguasa dan kapitalis sebagai alat untuk pemenuhan kepentingan kelas tersebut. Media biasanya melakukan pemaksaan konsensus ideologis (kesadaran palsu) dengan menggunakan mekanisme kontrol sosial guna mewujudkan sesuatu yang menguntungkan kelas penguasa (McQuail, 1991, hal. 91).

Maksud disini adalah bagaimana para kapitalis tersebut mengeksploitasi pekerja dan konsumen demi meraih keuntungan, kemudian bekerja secara ideologis dengan menyebarkan ide dan cara pandang kelas penguasa, lalu juga menolak ide-ide lain yang kemungkinan akan memunculkan kesadaran pada kelas pekerja. Dominasi ide dan marjinalisasi wacana yang dilakukan kelas penguasa melalui media itu berlangsung secara wajar, apa adanya, dan dapat dimengerti bersama. Proses yang membuat orang-orang dapat menerima dan melakukannya secara sukarela ini oleh Gramsci disebut dengan hegemoni media. Karena itulah James Lull (1998) mengatakan Hegemoni adalah proses dimana ideologi “dominan” disampaikan, kesadaran dibentuk, dan kuasa sosial dijalankan (Sobur, 2001, hal. 61).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat digambarkan proses hegemoni bekerja dengan jalan atau cara kerja yang nampak wajar. Berita diproduksi melalui cara yang halus, sehingga apa yang terjadi dan diberitakan oleh media nampak sebagai sebuah kebenaran yang dapat dinalar.

Teori hegemoni Gramsci menekankan bahwa dalam lapangan sosial ada pertarungan untuk memperebutkan penerimaan publik. Oleh karena itu, perlu usaha bagi kelompok dominan untuk menyebarkan ideologi dan kebenarannya tersebut agar diterima nalar awam (*common sense*). Jika ide atau gagasan kelompok dominan/berkuasa diterima sebagai sesuatu yang *common sense*, kemudian ideologi itu diterima, maka hegemoni terjadi (Eriyanto, 2001, hal. 107).

3. Teori Konflik

Menurut Davis (1977) Konflik berasal dari kata kerja latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara Sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara 2 orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya (Mantiri, 2013, hal. 4). Dalam bahasa yang lebih spesifik, konflik menggambarkan sikap penolakan antar pihak dan kompetisi yang dipengaruhi oleh dinamika politik. Konflik terjadi sebagai akibat dari kepentingan yang berlawanan, perbedaan *value*, atau kebutuhan yang mendorong interaksi pada sebuah konflik. Karena itu konflik dapat dipahami sebagai bentuk alamiah dari tantangan terhadap keberadaan hubungan dan aturan dalam perumusan kebijakan (Perwita dan Sabban, 2015, hal 16).

Sebagai sesuatu hal yang bersifat alamiah dan sulit untuk dielakan, konflik dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat persatuan

suatu kelompok. Namun jika konflik yang ada berkepanjangan, terkadang dapat memperburuk tatanan sosial masyarakat.

Secara umum Frans Pekey menyebutkan dalam teori konflik terdapat dua jenis konflik, yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal (Pekey, 2018, hal. 262).

1. Konflik Vertikal

Konflik vertikal dimaksudkan sebagai konflik antara elite dan massa (rakyat). Elit merupakan para pengambil kebijakan dan keputusan, baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah, kelompok bisnis, dan aparat militer. Hal yang paling menonjol dalam konflik vertikal ini, sebagaimana yang terjadi di Papua, adalah kekerasan oleh aparat negara ataupun oleh TPN/OPM, sehingga menimbulkan korban di kalangan rakyat, baik orang Papua maupun non-Papua.

2. Konflik Horizontal

Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi di kalangan masyarakat (massa) sendiri. Konflik horizontal terjadi antara kelompok masyarakat atau suku yang satu dengan kelompok masyarakat atau suku lainnya. Konflik horizontal dalam konteks Papua, maka konflik yang terjadi adalah antara kelompok atau suku orang Papua dengan kelompok atau suku non-Papua, dan diantara kelompok atau suku orang Papua sendiri.

Selain jenis konflik, kita perlu mengenal pula tipe konflik. Tipe Konflik nantinya akan membantu kita untuk menggambarkan persoalan sikap, perilaku, dan situasi yang ada. Menurut Fisher (2001) menyebutkan jika tipe konflik terdiri dari, pertama, tanpa konflik; kedua, konflik laten; ketiga, konflik terbuka; keempat, konflik di permukaan (Pekey, 2018, hal. 263). Tipe tanpa konflik menggambarkan situasi yang relatif stabil, hubungan antar kelompok bisa saling memenuhi dan damai. Tipe konflik laten adalah suatu keadaan yang didalamnya terdapat banyak persoalan, sifatnya tersembunyi dan perlu dibawa ke permukaan agar bisa ditangani. Tipe konflik terbuka adalah menggambarkan situasi dimana konflik sosial telah muncul ke permukaan, yang berakar dan sangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya. Terakhir yakni konflik di permukaan, menggambarkan konflik yang memiliki akar konflik yang dangkal atau lemah dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran, yang dapat diatasi dengan meningkatkan dialog terbuka.

F. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma kritis. Paradigma kritis mempunyai pandangan-pandangan tertentu tentang bagaimana sebuah media, citra tertentu yang dibentuk media, atau kepentingan-kepentingan suatu kelas yang berkuasa yang coba dibela oleh

media. Manfaat dari paradigma kritis adalah bahwa ia menantang *Welthanschauung* atau pandangan dunia dari penelitian komunikasi yang mapan. Stuart Hall melanjutkan dengan berbicara tentang “revolusi teoretis yang mendalam” dan fondasi baru studi media di tengah kemacetan analisis- analisis tradisional, tatkala positivisme empiris yang keras kepala di hari-hari bahagia ‘penelitian media’ punya segalanya, namun pada landasan berhenti yang gagap. Di tengah tantangan ini adalah kembalinya yang tertindas, yakni penemuan kembali ideologi dan signifikansi sosial serta politik dari bahasa, politik tanda, dan wacana (Hardt, 2005, hal. 272-273). Berdasarkan definisi tersebut, paradigma kritis coba menuntun untuk membongkar kenyataan palsu yang telah dibentuk oleh kelompok dominan untuk kepentingannya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode analisis wacana kritis. Menurut Denzin dan Lincoln (1987) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Moleong, 2018, hal. 5). Sementara analisis wacana kritis (AWK) merupakan sebuah metode yang sering kali digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial dan budaya sejak lama dan termasuk dalam kategori paradigma kritis. Hal ini dikarenakan analisis wacana kritis dianggap sebagai penerapan analisis kritis terhadap bahasa yang terinspirasi oleh

Marxisme ketika menyoroti aspek-aspek budaya dalam kehidupan sosial, yaitu ketika dominasi dan eksploitasi dipertahankan melalui budaya dan ideologi (Haryatmoko, 2016, hal. 2).

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian pada penelitian ini adalah teks pemberitaan surat kabar harian Kompas dan Republika, edisi 5 sampai dengan 12 Desember 2018 terkait pemberitaan mengenai kasus penembakan pekerja pembangunan jembatan oleh Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Nduga, Papua.

3. Sumber Data

1. Data primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah teks pemberitaan yang menjadi *headline* surat kabar harian Kompas dan Republika, edisi 5 sampai dengan 12 Desember 2018 yang terkait kasus penembakan 31 pekerja jembatan oleh Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Nduga, Papua.

Penelitian ini akan lebih spesifik mengambil teks pemberitaan mengenai wacana pemberitaan media dan akibat dari konflik tersebut.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder didapat dari kumpulan paper, skripsi, buku, video dan juga media tentang kasus konflik OPM di Kabupaten Nduga, Papua.

4. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Yaitu metode ilmiah dalam pengumpulan data melalui hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat dan sebagainya.

Pada penelitian ini peneliti akan mengambil dokumentasi melalui pengumpulan data berita yang berkenaan dengan pemberitaan surat kabar harian Kompas dan Republika, edisi 5 sampai dengan 12 Desember 2018 yang terkait kasus penembakan pekerja jembatan oleh Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Nduga, Papua pada beberapa literasi, media massa, dokumentasi video dan pidato politik untuk meneliti konteks sosial yang terjadi di masyarakat mengenai isu tersebut.

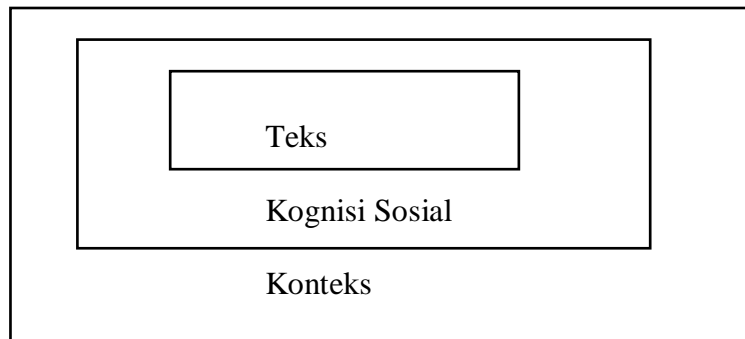
5. Analisis data

Setelah mendapatkan data yang diperlukan, data-data tersebut kemudian akan dianalisis sehingga menjadi bahasan yang jelas maksudnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis. Terdapat banyak macam dari model analisis

wacana kritis, salah satunya adalah model analisis wacana kritis yang dikemukakan oleh Teun A Van Dijk. Van Dijk (2009) berpendapat bahwa analisis wacana kritis tidak sebatas pada analisis kritis saja, namun juga teori kritis, dan penerapan-penerapannya juga kritis; untuk itu Van Dijk lebih memilih istilah *Critical Discourse Studies* atau studi wacana kritis (Haryatmoko, 2016, hal. 77).

Model analisis Teun A Van Dijk ini dikenal luas dengan model analisis kognisi. Hal ini dikarenakan studi wacana kritis ini tidak hanya menyoroti ketidakberesan sosial, namun juga menekankan studi tentang representasi mental dan proses-proses yang terjadi pada pengguna bahasa (*cognition*) ketika mereka memproduksi dan memahami wacana dan ambil bagian dalam interaksi pengetahuan, ideologi, atau kepercayaan kelompok sosial tertentu (Haryatmoko, 2016, hal. 79).

Secara menyeluruh, Van Dijk menggambarkan bila wacana memiliki tiga dimensi, yakni: teks, kognisi sosial, dan konteks sosial (Eriyanto, 2001, hal. 224). Ketiga dimensi tersebut menurut Van Dijk memiliki hubungan yang kuat meski tidak langsung. Model inilah yang menjadi acuan untuk analisis wacana dalam penelitian ini. Berikut gambaran posisi dari dimensi-dimensi tersebut dalam wacana menurut Van Dijk.



Gambar 1.2
Dimensi analisis wacana menurut Teun A Van Dijk.
Sumber: Eriyanto, 2001, hal. 225

Inti dari studi wacana kritis Van Dijk ini adalah menggabungkan tiga dimensi wacana tersebut ke dalam satu kesatuan analisis. Dalam dimensi teks, yang diteliti adalah bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Kemudian level kognisi sosial mempelajari proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu dari wartawan. Sedangkan pada aspek ketiga, mempelajari bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat terhadap suatu masalah.

6. Kredibilitas penelitian

Guna memperoleh keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Yaitu teknik memeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembandingan data itu. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik untuk menguji keabsahan data dengan cara

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

Teknik penelitian yang dibandingkan oleh peneliti adalah dokumentasi.